



**LAPORAN INOVASI LAYANAN PERMINTAAN TUNJANGAN KINERJA DAN TRANSPARANSI
PENGHASILAN DI LINGKUNGAN POLRI**

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Pendahuluan Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses permintaan tunjangan kinerja serta memberikan kemudahan bagi 1443 satuan kerja (Satker) di lingkungan Polri, telah dikembangkan sebuah inovasi layanan berbasis digital. Layanan ini bertujuan untuk mempercepat proses pengajuan tunjangan kinerja dan memberikan akses yang lebih transparan terhadap rincian penghasilan yang diterima oleh personel Polri, termasuk gaji dan tunjangan kinerja.

B. DASAR

1. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Polri;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Negara/Lembaga yang telah diubah dengan PMK Nomor 20 Tahun 2023;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Polri;

C. Tujuan Inovasi Inovasi ini bertujuan untuk:

1. Mempermudah dan mempercepat proses permintaan tunjangan kinerja bagi 1443 Satker.
2. Menyediakan layanan transparan bagi personel dalam mengecek rincian gaji dan tunjangan kinerja.
3. Mengurangi potensi kesalahan dalam proses administrasi keuangan.
4. Mengintegrasikan data secara real-time antara sistem penggajian, tunjangan, dan administrasi Polri.

D. Solusi Inovatif Inovasi yang diterapkan mencakup:

1. Aplikasi Digital Terpadu: Platform berbasis web dan mobile yang memungkinkan pengajuan tunjangan kinerja secara online.
2. Sistem Otomasi Verifikasi: Pemadanan data otomatis antara permintaan tunjangan kinerja dengan data administrasi keuangan.
3. Dashboard Transparansi Penghasilan: Menyediakan akses bagi personel untuk melihat rincian penghasilan secara real-time.
4. Integrasi dengan SIPP dan Puskeu Presisi: Memastikan bahwa data yang digunakan selalu terkini dan valid.
5. Implementasi Aplikasi Jitu Presisi Polri: Sebagai bagian dari transformasi digital menuju Zona Integritas WBBM.

E. Implementasi dan Manfaat

1. Efisiensi Waktu: Proses yang sebelumnya memakan waktu hingga beberapa minggu kini dapat diselesaikan dalam hitungan hari.
2. Akses Mudah dan Cepat: Personel dapat mengakses informasi kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital.
3. Transparansi yang Lebih Baik: Dengan adanya dashboard penghasilan, personel dapat memahami rincian gaji dan tunjangan kinerja yang mereka terima tanpa harus menunggu pencetakan slip gaji manual.
4. Akurasi Data: Mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan dan pengelolaan data tunjangan kinerja.

F. Kegiatan dan Pelaksanaan

Sebagai bagian dari implementasi inovasi, telah dilakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan menggunakan aplikasi Jitu Presisi Polri. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara daring melalui Zoom dalam satu hari pada tanggal 11 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh operator Satker memahami proses pengajuan tunjangan kinerja, penggunaan dashboard transparansi, serta pemanfaatan sistem otomatisasi verifikasi data.

G. Dokumentasi Kegiatan

1. Judul Dokumentasi: "Pelaksanaan Sosialisasi dan Implementasi Jitu Presisi Polri untuk Transparansi Tunjangan Kinerja"





H. Tahapan Kegiatan:

1. Pukul 09.00 – 10.00 WIB: Pembukaan oleh Pimpinan Puskeu Presisi dan pemaparan tujuan inovasi, Presentasi sistem Jitu Presisi Polri dan fitur-fitur utamanya.
2. Pukul 10.30 – 12.00 WIB: Simulasi penggunaan sistem oleh peserta.
3. Pukul 12.00 – 13.00 WIB: Istirahat.
4. Pukul 13.00 – 15.00 WIB: Sesi tanya jawab dan diskusi teknis, Evaluasi dan kesimpulan, Pukul 16.00 – 16.30 WIB: Penutupan kegiatan.

I. Kesimpulan dan Rekomendasi Inovasi

layanan ini telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan tunjangan kinerja di lingkungan Polri. Ke depan, pengembangan lebih lanjut dapat mencakup:

1. Peningkatan fitur keamanan data untuk menjaga privasi dan integritas informasi personel.
2. Penggunaan teknologi AI untuk analisis prediktif dalam pengelolaan tunjangan dan gaji.
3. Integrasi lebih luas dengan sistem keuangan negara untuk mempercepat pencairan dana.

Dengan adanya inovasi ini, diharapkan proses administrasi keuangan di lingkungan Polri menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban serta bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 11 Februari 2025

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI



LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI